

BAB I

PENDAHULUAN

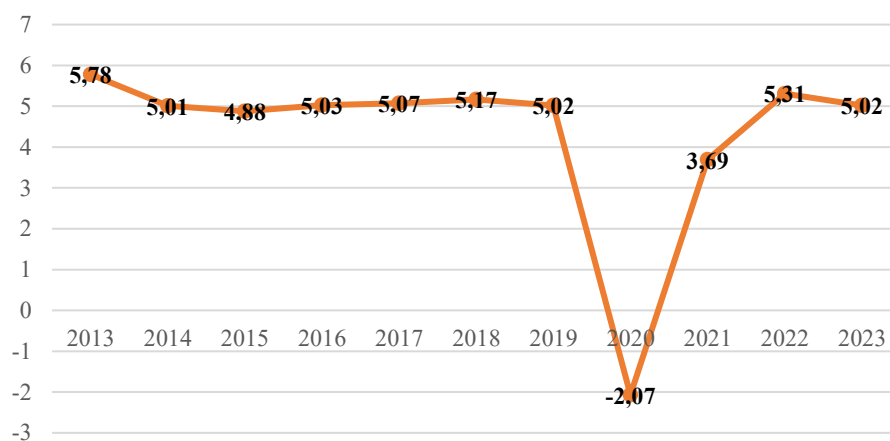
1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator mendasar yang menggambarkan kapasitas suatu negara dalam memperluas produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Berdasarkan data *World Bank*, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2013–2023 menunjukkan kecenderungan yang melambat dan tidak stabil, dengan rata-rata pertumbuhan hanya mencapai 4,27 persen per tahun jauh dari target pemerintah sebesar 7 persen per tahun (Sriyanto et al., 2021). Pada awal periode, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,78 persen pada tahun 2013, namun secara bertahap mengalami perlambatan hingga menyentuh angka 4,88 persen pada tahun 2015. Titik terendah terjadi pada tahun 2020 ketika perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,07 persen sebagai dampak dari pandemi *COVID-19*. Memasuki fase pemulihan, Indonesia berhasil membukukan pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 5,31 persen pada tahun 2022, meskipun capaian tersebut dinilai masih belum mencerminkan potensi optimal perekonomian nasional (Kementerian Keuangan, 2023).

Kajian mengenai ketahanan ekonomi Indonesia di masa pandemi *COVID-19* mengungkapkan bahwa Indonesia mampu menjalani proses pemulihan yang relatif cepat, ditandai dengan kembalinya laju pertumbuhan PDB ke level sebelum pandemi. Pemulihan tersebut didukung oleh implementasi Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia (Waroi, 2024). Kebijakan stimulus fiskal pemerintah melalui belanja

modal dan belanja infrastruktur telah diimplementasikan untuk mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis moneter 1997 dan 2008, namun efektivitasnya masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi (Sriyanto et al., 2021). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah mampu memberikan pengaruh positif terhadap perekonomian nasional.

Gambar 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



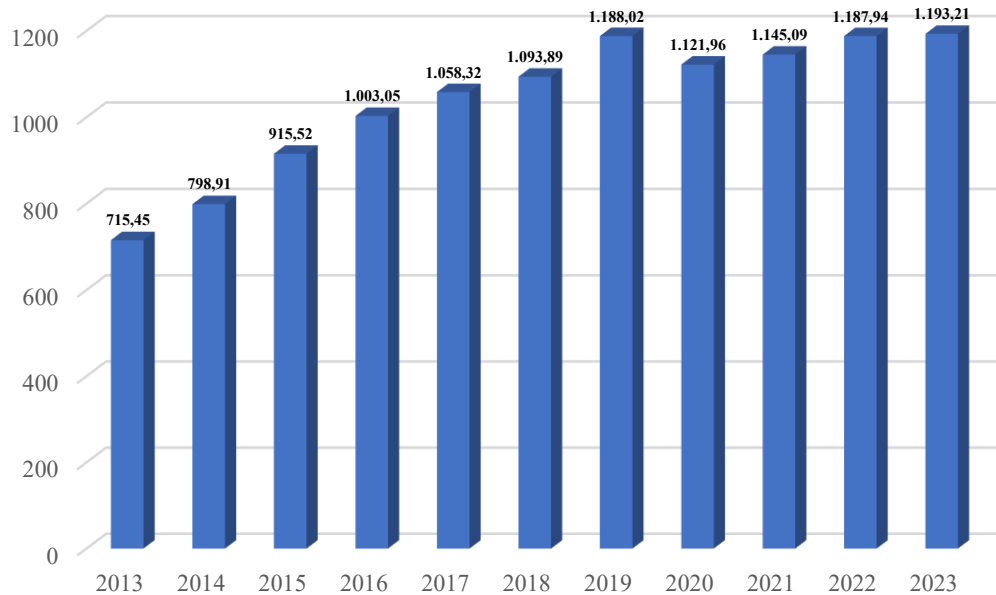
Sumber : *World Bank* (data diolah, 2026)

Dinamika pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 2013–2023 sebagaimana tersaji pada Gambar 1.1 mencerminkan tren perlambatan jangka panjang, dari 5,78 persen pada awal periode menjadi 5,02 persen pada akhir periode, dengan rata-rata pra-pandemi sebesar 5,14 persen per tahun. Temuan Kusumatriisna et al. (2019) relevan dalam konteks ini, di mana rasio pengeluaran pemerintah terhadap PDB dan pertumbuhan penduduk terbukti memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Lebih lanjut, Hermawan & Hartono (2022) mengidentifikasi paradoks menarik: tingginya akumulasi modal fisik dalam beberapa tahun terakhir tidak serta-merta berbanding lurus dengan akselerasi

pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2020, tren perlambatan ini diperparah oleh kontraksi ekonomi sebesar -2,07 persen akibat pembatasan aktivitas yang dipicu pandemi *COVID-19*. Meski pemulihan pascapandemi berjalan positif ditandai pertumbuhan 3,69 persen pada 2021 dan 5,31 persen pada 2022 perlambatan kembali terjadi pada 2023 dengan pertumbuhan hanya 5,02 persen, mengindikasikan bahwa tantangan struktural perekonomian Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan.

Fenomena perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah yang terus terjadi setiap tahunnya. Data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa belanja pemerintah mengalami peningkatan secara konsisten selama periode 2013-2023. Pengeluaran pemerintah melalui belanja modal diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik (Sriyanto et al., 2021). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap PDB Indonesia masih tergolong rendah 1,5-2 persen dibandingkan dengan negara berkembang lainnya seperti China 6 persen dan India 4 persen (Waryanto, 2017). Sebagaimana dikemukakan oleh (Mankiw, 2012) dalam bukunya *Principles of Economics*, pengeluaran pemerintah yang efektif seharusnya mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga ketidaksesuaian antara peningkatan pengeluaran pemerintah dengan capaian pertumbuhan ekonomi mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas alokasi dan implementasi belanja pemerintah.

Gambar 1. 2 Pengeluaran Pemerintah Indonesia



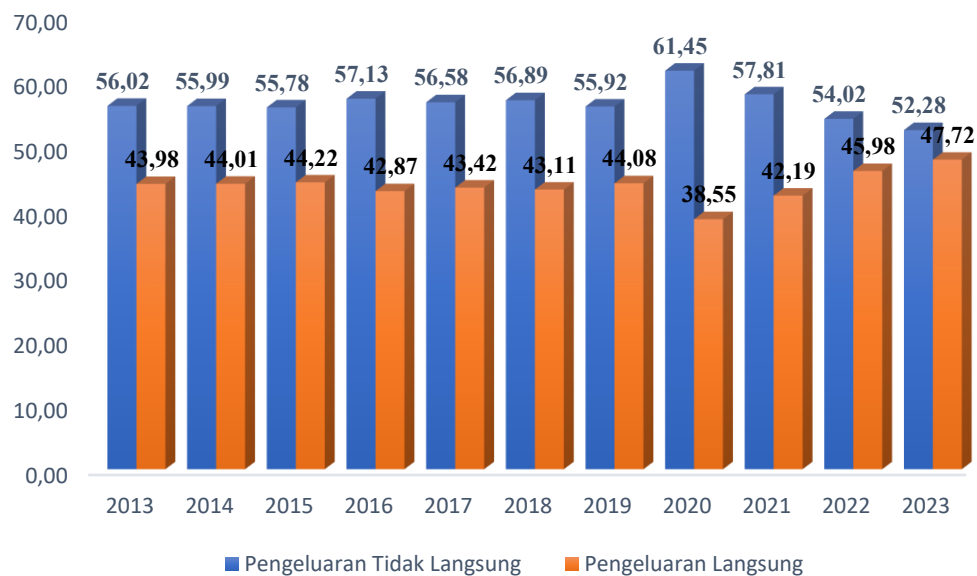
Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Gambar 1.2 menunjukkan tren pengeluaran pemerintah Indonesia yang meningkat secara konsisten dari Rp715,45 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp1.193,21 triliun pada tahun 2023, atau meningkat sekitar 66,8 persen selama sepuluh tahun. Wardhana et al. (2020) dalam penelitiannya mengenai dinamika penduduk dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia menemukan bahwa pengeluaran pemerintah merupakan salah satu variabel kontrol yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto. Hulu & Wahyuni (2021) juga menegaskan bahwa infrastruktur memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan pemerataan distribusi pendapatan, dimana pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur menjadi salah satu instrumen utama. Menariknya, pada tahun 2020 terjadi penurunan pengeluaran pemerintah dari Rp1.188,02 triliun menjadi Rp1.121,96 triliun, yang mengindikasikan adanya realokasi anggaran untuk penanganan pandemi *COVID-19*. Widodo (2020) dalam

penelitiannya mengenai pengaruh belanja pemerintah pusat terhadap PDRB pemerintah provinsi tahun 2014-2019 menemukan bahwa akumulasi modal melalui belanja modal, belanja barang, dan belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk meningkatkan output barang dan jasa pemerintah daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Paradoks antara peningkatan pengeluaran pemerintah dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi ini menjadi fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam.

Rantebua et al. (2020) dalam kajiannya tentang pengaruh kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2009–2018 mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal yang diprosikan melalui penerimaan negara, belanja negara, dan pembiayaan terbukti berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sejalan dengan itu, Ramadhan (2023) menekankan bahwa kebijakan fiskal memegang peranan yang sangat strategis bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya dalam menghadapi berbagai tekanan eksternal seperti dampak pandemi *COVID-19*, fluktuasi harga komoditas global, dan ketidakpastian perekonomian dunia. Suyitno (2023) menambahkan bahwa meskipun kinerja ekonomi Indonesia secara umum dinilai cukup baik, negara ini masih dihadapkan pada tantangan besar untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*) dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ketidakselarasan antara tren peningkatan pengeluaran pemerintah dan laju pertumbuhan ekonomi yang belum optimal tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan komposisi belanja negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Gambar 1. 3. Proporsi Pengeluaran Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah Indonesia

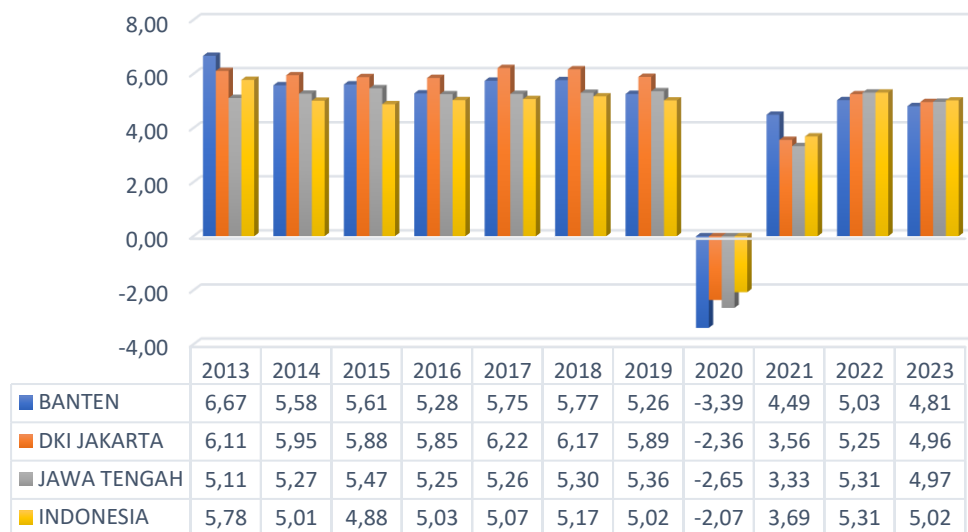


Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Gambar 1.3 memperlihatkan komposisi belanja pemerintah yang terbagi menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung selama periode 2013-2023. Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi belanja tidak langsung secara konsisten lebih besar dibandingkan belanja langsung, dengan rata-rata 56,35 persen untuk belanja tidak langsung dan 43,65 persen untuk belanja langsung. Pada tahun 2020 saat pandemi *COVID-19*, proporsi belanja tidak langsung meningkat tajam menjadi 61,45 persen, sementara belanja langsung menurun menjadi 38,55 persen, yang mengindikasikan adanya pergeseran prioritas belanja pemerintah untuk penanganan pandemi melalui bantuan sosial dan subsidi. Rudibdo & Sasana (2017) menemukan bahwa pengeluaran langsung dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara belanja tidak langsung menunjukkan hasil yang berbeda. Kosali et al. (2021) membedakan belanja pemerintah pusat menjadi belanja berjalan dan belanja modal, dimana masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahasoan et al. (2025)

menegaskan bahwa secara teoritis, desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat akuntabilitas fiskal, namun secara empiris hasilnya bervariasi tergantung pada kapasitas fiskal daerah dan kualitas institusi. Proporsi antara belanja langsung yang mencakup belanja modal dengan belanja tidak langsung yang mencakup belanja operasional menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 1. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), (data diolah)

Gambar 1.4 menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi ketiga provinsi sampel penelitian dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Data tersebut memperlihatkan bahwa ketiga provinsi mengalami pola pertumbuhan yang relatif serupa dengan tren nasional, dengan pertumbuhan positif pada periode 2013-2019, kontraksi tajam pada tahun 2020 akibat pandemi *COVID-19*, dan pemulihan bertahap pada tahun 2021-2023. Provinsi Banten mengalami kontraksi paling dalam pada tahun 2020 sebesar -3,39 persen, lebih dalam dibandingkan kontraksi nasional

-2,07 persen, diikuti oleh Jawa Tengah -2,65 persen dan DKI Jakarta -2,36 persen. Sebelum pandemi, ketiga provinsi memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (5,14 persen), yakni Banten 5,70 persen, DKI Jakarta 6,01 persen, dan Jawa Tengah 5,29 persen.

Belanja modal pemerintah yang mencakup belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya merupakan salah satu bentuk investasi publik yang berperan dalam memperluas kapasitas produksi dan meningkatkan produktivitas perekonomian (Sriyanto et al., 2021). Secara regulasi, definisi belanja modal merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 yang menetapkan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dengan masa manfaat yang melampaui satu periode akuntansi.

Berbagai kajian empiris mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah memiliki keterkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, meskipun besaran dan arah pengaruhnya kerap bervariasi bergantung pada konteks wilayah dan jenis belanja yang dianalisis. Penelitian Najmuddin (2020) dalam penelitiannya di Provinsi Banten menemukan bahwa pengeluaran pemerintah secara agregat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan analisis Tabel *Input-Output*. Lebih lanjut, hasil regresi data panel dalam penelitian yang sama menunjukkan bahwa seluruh komponen belanja modal memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan belanja jalan, irigasi, dan jaringan serta belanja gedung dan bangunan sebagai komponen yang paling signifikan. Temuan ini memperkuat argumen bahwa efektivitas belanja modal tidak bersifat

seragam, melainkan sangat ditentukan oleh jenis dan fungsi ekonomi dari belanja yang dialokasikan.

Hasil yang relatif sejalan juga ditemukan oleh Mahdawi et al. (2021) di Provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pendapatan asli daerah tidak selalu menjadi pendorong pertumbuhan. Pada tingkat nasional, Wahyudi (2023) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah provinsi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, menguatkan pandangan Keynesian bahwa belanja pemerintah berperan dalam mendorong permintaan agregat dan aktivitas ekonomi.

Namun, sejumlah penelitian justru menunjukkan hasil yang berbeda. Damanik et al. (2023) menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, sementara pertumbuhan penduduk justru menjadi variabel yang berpengaruh positif. Majid et al. (2025) memperoleh kesimpulan serupa di Kabupaten Sidrap, di mana belanja modal pemerintah gagal memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja modal tidak otomatis mendorong pertumbuhan tanpa didukung perencanaan yang baik dan implementasi yang efektif.

Studi internasional juga menunjukkan hasil yang beragam. Paudel (2023) dalam penelitiannya di Nepal menemukan bahwa belanja modal dan belanja rutin pemerintah secara agregat tidak berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, ketika dianalisis secara terdisagregasi, belanja pendidikan baik

modal maupun rutin terbukti memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja kesehatan lebih efektif apabila difokuskan pada belanja modal. Sementara itu, penelitian Ugochukwu & Oruta (2021) serta Chandana et al. (2021) di Nigeria menunjukkan bahwa belanja modal pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja rutin cenderung tidak signifikan.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi bersifat kontekstual, bergantung pada jenis belanja, struktur pengeluaran, serta karakteristik wilayah dan periode analisis. Ketidak konsistenan hasil empiris ini menegaskan bahwa peningkatan belanja pemerintah belum tentu diikuti oleh percepatan pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan pendekatan yang mampu menangkap perbedaan kontribusi antarjenis belanja modal. Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat diduga bahwa masing-masing komponen belanja modal memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran pengeluaran pemerintah terhadap output dan nilai tambah sektor ekonomi serta pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013–2023, sekaligus mengidentifikasi komponen belanja modal yang paling efektif. Kebutuhan akan rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris menjadikan penelitian ini urgen secara praktis (Sriyanto et al., 2021). World Bank (2020) menekankan bahwa efisiensi belanja modal merupakan kunci pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sementara Khusaini (2022) menambahkan bahwa kualitas sektor publik yang baik berdampak pada

pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan daya saing regional. Ramadhan (2023) menegaskan relevansi kajian fiskal di Indonesia, terutama yang menyoroti sisi belanja dan perpajakan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan mengisi kesenjangan literatur mengenai peran dan kontribusi spesifik tiap komponen belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Untuk menjawab tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan desain dua tahap yang saling berkesinambungan secara metodologis. Tahap pertama menggunakan analisis Tabel *Input-Output* untuk memetakan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap output dan nilai tambah sektor ekonomi secara nasional, sekaligus menegaskan validitas fenomena inkonsistensi antara peningkatan pengeluaran pemerintah dan perlambatan pertumbuhan ekonomi yang menjadi latar penelitian ini. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan metodologis dalam mendekomposisi kontribusi diferensial antarjenis instrumen fiskal, khususnya antara belanja modal dan belanja operasional. Mengingat belanja modal memiliki karakteristik diskresioner serta berpotensi menghasilkan efek pengganda jangka panjang yang lebih signifikan terhadap kapasitas produktif perekonomian, penelitian ini melanjutkan analisis dengan mendekomposisi pengeluaran pemerintah ke dalam lima komponen belanja modal melalui pendekatan studi kasus kuantitatif (*quantitative case study*) berbasis regresi data panel pada provinsi-provinsi terpilih, guna mengidentifikasi instrumen kebijakan fiskal yang paling efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lokasi penelitian dipilih pada tiga provinsi, yaitu Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, sebagai unit kasus (*case study*) yang ditetapkan secara purposif dengan pertimbangan akademis dan empiris. Ketiga provinsi tersebut berada di Pulau Jawa

yang menyumbang sekitar 58 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional berdasarkan (BPS, 2020), sehingga memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia. Selain itu, selama periode 2013-2023 ketiga provinsi menunjukkan kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi, meskipun realisasi pengeluaran pemerintah, mengalami peningkatan. Kondisi ini relevan dengan permasalahan penelitian yang ingin menguji efektivitas pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pemilihan provinsi juga mempertimbangkan ketersediaan dan konsistensi data belanja modal yang diperoleh dari *website* Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) masing-masing provinsi. Secara empiris, penelitian terdahulu seperti Najmuddin (2020) juga menjadikan provinsi di Pulau Jawa sebagai lokasi penelitian karena karakteristik ekonominya yang representatif dan memiliki variasi struktur ekonomi yang memadai untuk dianalisis. Populasi penelitian mencakup seluruh data belanja modal dan pertumbuhan ekonomi dari ketiga provinsi tersebut selama periode 2013-2023, yang dianalisis menggunakan metode Tabel *Input-Output* pada tingkat nasional serta analisis regresi data panel pada tingkat kasus provinsi terpilih. Penetapan ketiga provinsi sebagai unit kasus tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik terhadap seluruh provinsi di Indonesia, melainkan generalisasi analitis (*analytical generalization*) atas mekanisme pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah dengan karakteristik struktural serupa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pengeluaran pemerintah terhadap output sektor ekonomi Indonesia berdasarkan analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016?
2. Bagaimana peran pengeluaran pemerintah terhadap nilai tambah bruto sektor ekonomi Indonesia berdasarkan analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016?
3. Bagaimana peran perubahan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016?
4. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Tanah terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta?
5. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta?
6. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta?
7. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta?
8. Bagaimana pengaruh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran pengeluaran pemerintah terhadap output sektor ekonomi Indonesia berdasarkan analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016.
2. Mengetahui peran pengeluaran pemerintah terhadap nilai tambah bruto sektor ekonomi Indonesia berdasarkan analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016.
3. Mengetahui peran perubahan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia berdasarkan analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016.
4. Mengetahui pengaruh Belanja Modal Tanah terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
5. Mengetahui pengaruh Belanja Modal Peralatan dan Mesin terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
6. Mengetahui pengaruh Belanja Modal Gedung dan Bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
7. Mengetahui pengaruh Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

8. Mengetahui pengaruh Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi pada studi kasus Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada tiga aspek utama: substansi, subjek, dan variabel yang diteliti. Secara substansi, kajian difokuskan pada pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui dua tahap analisis yang saling berkesinambungan, yaitu analisis Tabel *Input-Output* tahun 2016 pada tingkat nasional dan regresi data panel pada tingkat kasus provinsi terpilih untuk periode 2013-2023. Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menjadi variabel dependen, sementara variabel independen mencakup lima komponen belanja modal: Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Subjek penelitian pada tahap studi kasus adalah tiga provinsi yang ditetapkan sebagai unit kasus secara purposif, yaitu Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, dengan total unit observasi sebanyak 33 ($3 \text{ provinsi} \times 11 \text{ tahun}$). Adapun cakupan materi penelitian meliputi tiga hal pokok: peran pengeluaran pemerintah terhadap *output*, Nilai Tambah Bruto (NTB) sektor ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional, serta pengaruh masing-masing komponen belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada tingkat kasus provinsi terpilih dan juga identifikasi komponen belanja modal yang paling efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pada ketiga provinsi tersebut. Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini secara eksplisit membatasi diri hanya pada komponen belanja modal, sehingga komponen pengeluaran pemerintah lainnya

seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, maupun belanja bantuan sosial tidak termasuk dalam lingkup pembahasan. Selain itu, sebagaimana lazim dalam desain studi kasus, temuan pada tahap kedua ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasikan secara statistik terhadap seluruh provinsi di Indonesia, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai mekanisme pengaruh belanja modal pada wilayah dengan karakteristik struktural yang representatif.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan hasil penelitian yang dilakukan bisa memberikan manfaat bagi semua orang. Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi, khususnya dengan pendekatan disagregasi komponen belanja modal. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian empiris terkait teori Keynesian dan hukum Wagner dalam perekonomian Indonesia, serta memberikan bukti tambahan mengenai efektivitas masing-masing jenis belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi pada wilayah dengan karakteristik struktural serupa dengan kasus yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak:

- a. Bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, khususnya provinsi dengan karakteristik struktural serupa dengan Provinsi Banten, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dan prioritas belanja modal yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Identifikasi jenis belanja modal yang paling signifikan dapat membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran.
- b. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan, temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar evaluasi efektivitas pengeluaran pemerintah dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi dan pembandingan untuk penelitian sejenis. Mengingat penelitian ini masih terbatas pada tiga provinsi sebagai unit kasus, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah ke provinsi-provinsi lain di Indonesia guna menguji konsistensi temuan secara lebih luas, serta mempertimbangkan periode waktu atau variabel belanja lain yang belum tercakup dalam penelitian ini.